

Wow... Habis Rp23,5 Miliar!

Anggaran Biaya Perjalanan Dinas DPRD Kalbar

PONTIANAK - Dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran 2011 di Sekretariat DPRD Kalbar, muncul usul tambahan anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Kalbar sebesar Rp4,492 miliar.

Dana itu direncanakan akan digunakan untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam maupun ke luar daerah.

Dengan demikian, jika digabungkan dengan anggaran perjalanan dinas DPRD dalam APBD murni 2011, biaya untuk kunjungan kerja mencapai Rp23,5 miliar.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar,

Retno Pramudya, masalah perjalanan dinas tersebut pantas dikritisi dan perlu dikaji kembali. Soalnya, bagi Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar ini, agenda perjalanan dinas selama ini terlalu padat (intensitas tinggi) sehingga mengurangi waktu DPRD dalam menjalankan tugas sehari-hari.

• ke halaman 15 kolom 5



Sumber:
Renja Perubahan Anggaran
di Setwan

Perjalanan Dinas

- Sebelum anggaran perubahan
Rp19.036.058.000
- Tambahan yang diusulkan
Rp4.492.383.000
- Total setelah perubahan
Rp23.528.441.000



Wow... Habis Rp23,5 Miliar

Sambungan dari halaman 9

"Kinerja dalam menjalankan fungsi kedewanan jadi terganggu. Waktu untuk melakukan sidang, menjalankan fungsi legislasi, menyerap aspirasi, raker-raker dengan mitra kerja dan untuk memonitor realisasi program yang dijalankan eksekutif jadi berkurang," ujarnya kemarin. Apalagi, masalah perjalanan dinas ini di tahun sebelumnya sempat menjadi temuan BPK RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar puluhan juta rupiah. Terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang sama, pada waktu yang bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp27.300.000.

Kemudian, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp48.600.000. Selain itu, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Reses TA 2010 sebesar Rp7.100.000.

Tak hanya itu, Retno juga

mengakui bahwa ada oknum dewan yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas saat kunjungan kerja. Ada oknum yang ikut berangkat bersama-sama tetapi ketika di tempat tujuan, yang bersangkutan justru tidak kelihatan.

"Alhamdulillah kalau kami di PPP, masalah ini sangat kami tekankan. Anggota yang ikut kunjungan kerja harus sampai ke tujuan. Kalau tidak, akan kami sanksi tegas," katanya.

Menurut Retno, kritik terhadap perjalanan dinas ini lebih dapat diterima daripada rencana pembelian kendaraan dinas operasional (Pajero Sport dan Speed boat) DPRD. Rencana pembelian kendaraan dinas dinilai memang merupakan suatu kebutuhan bagi menunjang tugas DPRD.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional Kalimantan Barat Deman Hari Gustira juga menyoroti masalah biaya perjalanan dinas DPRD ini. Ia berharap, DPRD dapat menyusun anggaran secara rasional, efisien dan betul-betul didasarkan pada kebutuhan. Terlebih lagi, selama ini masalah perjalanan dinas dianggap kurang transparan.

"Biaya perjalanan dinasnya harus diperhitungkan secara rasional. Harus ditrek, kemana-

kemana saja, untuk apa, itu harus dicek betul. Selama ini, kita tidak tahu kemana-kemana saja mereka," katanya.

Hasil-hasil dari kunjungan kerja juga dinilai masih perlu dipertanyakan, baik menyangkut mekanisme pertanggungjawaban maupun sisi manfaat kunjungan bagi masyarakat atau pembangunan daerah. "Malah, kalau ditotal-total, perjalanan dinas DPRD itu kemungkinan di atas 360 hari," ujarnya. Deman menyesalkan wacana ini justru lebih diperdebatkan di kalangan DPRD sehingga mencuat ke publik. Semestinya, kata dia, DPRD lebih getol mempersoalkan, memperjuangkan atau mewacanakan bagaimana masalah pelayanan publik, masalah listrik, kerusakan jalan, BBM, kelangkaan pupuk dan masalah-masalah lain yang menyentuh kepentingan masyarakat. Menurut Deman, DPRD harus lebih mempertimbangkan jadwal kunjungan kerja. Jangan sampai kunjungan kerja tersebut kemudian mengganggu tugas-tugas pokok DPRD sebagai wakil rakyat atau hanya memboroskan anggaran. Apalagi masih banyak keperluan lain yang lebih mendesak di sektor publik terutama pendidikan dan kesehatan serta peningkatan indeks pembangunan manusia. (rnl)